

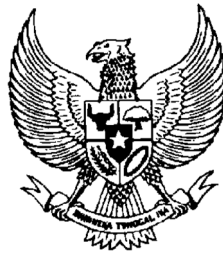


# RENJA

**RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2023**



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 188.44/298/2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
  - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;

- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

**KETIGA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Juli 2023

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUGIANTO SABRAN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:  
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:  
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;  
c. Asisten Administrasi Umum; dan  
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Palangka Raya, Desember 2023



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Tengah,

*[Handwritten Signature]*  
**BARU, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700228 199803 1 007

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	30
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>31</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	31
3.3 Program dan Kegiatan .....	33
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam peraturan dimaksud diamanatkan bahwa Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk periode Tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sehingga penyusunan Renja PD dilakukan secara silmutan/paralel dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disusun agar dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama dalam tahun anggaran 2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja PD merupakan proses awal dari penyusunan perencanaan program dan anggaran PD yang akan terkait dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, sehingga program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja PD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD Tahun 2024.

#### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kalimantan Tengah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Penyusunan Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Tahun Anggaran 2024, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.

#### 2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.
- b. Merencanakan target dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN**, terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Renja PD.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, memuat uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana dari program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan.

**BAB V PENUTUP** memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD**

Pada Tahun Anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran sebesar **Rp. 23.325.577.182,-** (Dua puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 22.947.081.845,-** (Dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan Belanja Modal **Rp. 378.495.337,-** (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Adapun tingkat Capaian dan Realisasi anggaran dimaksud adalah sebagai berikut :

**Dana APBD Provinsi**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>11.791.448.133</b>	<b>11.703.863.313</b>	<b>99,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>346.073.400</b>	<b>345.481.170</b>	<b>99,83</b>	<b>100,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.183.000	47.130.300	99,89	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.624.000	37.537.500	99,84	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.757.350	19.726.000	99,90	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000	49.952.000	99,98	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	66.774050	66.763.570	99,77	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.735.000	54.493.600	99,56	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	69.878.500	99,83	100,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.527.129.049</b>	<b>9.598.630.875</b>	<b>91,18</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.509.129.049	9.580.660.875	91,17	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.999.000	99,99	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000	7.971.000	99,64	100,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.078.261.133</b>	<b>1.078.062.640</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000	6.500.000	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.824.133	209.709.150	99,95	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan	20.000.000	19.998.250	99,99	100,00



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	(%)
	Penggandaan				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	722.937.400	722.892.000	99,99	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	94.000.000	93.962.700	99,96	100,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.975.613.600</b>	<b>9.895.176.565</b>	<b>99,19</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.970.000	99,40	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.620.000	198.418.454	80,46	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.723.993.600	9.691.788.111	99,67	100,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>373.500.000</b>	<b>367.172.938</b>	<b>98,31</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	144.111.933	96,07	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.989.900	99,95	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	203.500.000	203.071.105	99,79	100,00
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>1.025.000.000</b>	<b>1.017.368.278</b>	<b>99,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>800.000.000</b>	<b>796.985.478</b>	<b>99,62</b>	<b>100,00</b>
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	133.410.000	131.635.750	98,67	100,00
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	147.590.000	146.413.500	99,20	100,00
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	69.000.000	68.984.000	99,98	100,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	225.000.000	224.972.462	99,99	100,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	255.000.000	224.979.766	99,99	100,00
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>219.000.000</b>	<b>216.039.200</b>	<b>98,65</b>	<b>100,00</b>
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	85.000.000	84.175.100	99,03	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	(%)
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	49.500.000	47.900.850	96,77	100,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	84.500.000	83.963.000	99,36	100,00
	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.343.600</b>	<b>72,39</b>	<b>100,00</b>
	Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	6.000.000	4.343.600	72,39	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.325.577.182</b>	<b>22.301.892.466</b>	<b>95,61</b>	<b>100,00</b>

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2022 khususnya yang bersumber dari dana APBD untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat tercapai, dan dapat diketahui dari pencapaian Prosentase Penyerapan Anggaran sebesar **95,61%** (Sembilan puluh lima koma enam puluh satu persen) dan Prosentase fisik mencapai **100,00 %** (Seratus persen).

Sehingga beberapa kegiatan terdapat sisa anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 87.584.820,-** (Delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau **0,74 %** (nol koma tujuh puluh empat persen) dari pagu anggaran yang tersedia.  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 592.230,-** (Lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) atau **0,17 %** (nol koma tujuh belas persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 928.498.174,-** (Sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) atau **8,82 %** (delapan koma delapan puluh dua persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 198.493,-** (Seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau **0,02 %** (nol koma nol dua persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 80.437.035,-** (Delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah) atau **0,81%** (nol koma delapan satu persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 6.327.062,-** (Enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah) atau **1,69 %** (satu koma enam puluh sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 7.631.722,-** (Tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) atau **0,74 %** (nol koma tujuh empat persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 3.014.522,-** (Tiga juta empat belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) atau **0,38 %** (nol koma tiga puluh delapan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.960.800,-** (Dua juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) atau **1,35 %** (satu koma tiga puluh lima persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.656.400,-** (Satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau **27,61 %** (dua puluh tujuh koma enam puluh satu persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang semaksimal mungkin sesuai dengan pagu anggaran yang sudah tersedia.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>									
1.05.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Persentase keterlaksanaan	100%	-						
1.05.01.1.01	<b>Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100%	-						
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan program kerja SOPD	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	40
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA SOPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan RKA Perubahan SOPD	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA SOPD	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan DPA Perubahan SOPD	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	12 dokumen	40
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%							
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS Satpol PP Provinsi Kalteng	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	40
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SOPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan realisasi keuangan semesteran	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	40
<b>1.05.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%							
1.05.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	2 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
<b>1.05.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	-						
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100	-	100 orang	40
1.05.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100	-	100 orang	40
<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100%							
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan	25 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	10 jenis	40
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 jenis	12 jenis	40
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan	35 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	14 jenis	40
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan koran bagi pegawai	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	6 jenis	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan minuman bagi tamu kantor	100 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100	20 jenis	40 jenis	40
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	40
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Media informasi online Satpol PP Provinsi Kalteng yang up to date	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%							40
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat dan pembelian materai	500 surat/paket	100 surat/paket	100 surat/paket	100 surat/paket	100	100 surat/paket	200 surat/paket	40
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, telepon dan jaringan internet	15 rekening	3 rekening	3 rekening	3 rekening	100	3 rekening	6 rekening	40
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelola administrasi keuangan dan Gaji Tenaga Kontrak	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	4 jenis	40
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%							
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas/operasional	120 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	40 unit	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Dinas Operasional atau Lapangan									
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service peralatan kantor	34 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	6 jenis	40
1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	4 unit	40
<b>1.05.02</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi	100%	-						
<b>1.05.02.1.01</b>	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100%	-						
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dan cegah dini, serta terlaksananya pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	70 Kab/Kota	14 Kab/Kota -	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, unjuk rasa dan kerusuhan massa	70 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	70 Kab/Kota	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sistem keamanan lingkungan dan deteksi dini kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas dan bencana	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	20 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	8 kegiatan	40
1.05.02.1.02	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam</b>	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100%	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2023	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	<b>1 (Satu) Daerah Provinsi</b>									
<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100%	-						
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pengawasan kepatuhan pelaksanaan penegakan Perda dan Pergub	70 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40
<b>1.05.02.1.03</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100%	-						
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Terlaksananya pemberkasan administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	70 Kab/Kota	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	28 Kab/Kota	40

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disampaikan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kinerja pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain sebagai berikut yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan, antara lain :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
- 2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
- 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- 6) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan Sub Kegiatan :

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- 2) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
  - 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
  - 2) Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

### a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat
3. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
5. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
7. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.

### b. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Dalam pelaksanaan Analisa identifikasi lingkungan internal dan Analisa identifikasi lingkungan Eksternal pada Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan S W O T, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat KEKUATAN (Strength) dan KELEMAHAN (Weakness) yang akan dilakukan, apa yang menjadi PELUANG (OPPORTUNITIES) dan TANTANGAN (THREATS) Dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal.

##### a) Kekuatan (Strength)

- 1) Dasar Hukum Keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Komitmen Masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik ;

- 3) Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi, Kabupaten, Kota se - Kalimantan Tengah ;
- 4) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai ;
- 5) Terjalannya kondisi dan hubungan kemitraan dengan POLRI, Kabupaten/Kota, Kiai, Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Kalimantan Tengah ;
- 6) Terjalannya kerja sama dengan Aparatur Keamanan (POLRI) dan instansi terkait untuk terciptanya situasi Kalimantan Tengah yang kondusif ;
- 7) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Kalimantan Tengah.

b) Kelemahan (Weakness).

- 1) Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah/ Protap Tentang Polisi Pamong Praja ;
- 2) Belum mantapnya materi (Silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja ;
- 3) Belum Optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Operasional lapangan Trantibum ;
- 4) Belum Optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap Tugas ;
- 5) Anggota Polisi Pamong Praja masih ada yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan DIKLAT Polisi Pamong Praja;
- 6) Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja di lapangan yang masih belum sesuai dengan Prosedur tetap (PROTAP) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP) ;
- 7) Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin.
- 8) Padatnya jumlah penduduk dan penyerapan angkatan kerja yang kurang di Kalimantan Tengah.

## **2. Lingkungan Eksternal**

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan ;
- 2) Mantapnya kerukunan warga masyarakat ;

- 3) Kehidupan Masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tenteram ;
- 4) Adanya semangat reformasi dan paradigma baru ;
- 5) Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat ;
- 6) Tumbuh kesempatan yang luas untuk berprasaangka mengambil keputusan ;
- 7) Terjadinya hubungan dengan aparatur POLRI (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

**b. Ancaman (Threats)**

- 1) Pengaruh Negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi ;
- 2) Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) ;
- 3) Tuntutan Kualitas dan Kuantitas pelayanan Publik ;
- 4) Kontrol sosial semakin meningkat ;
- 5) Lemahnya Koordinasi ;
- 6) Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan ;
- 7) Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat ;
- 8) Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja ;
- 9) Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota / lokasi tertentu ;
- 10) Krisis ekonomi multi dimensi yang belum juga pulih sehingga dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.

**c. Analisis Strategis dan Pilihan**

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dari analisa identifikasi lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan Asumsi Analisa SWOT sebagai berikut :

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
3. Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesional.
4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara Pemerintahan.
5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana prasarana kerja yang cukup.
6. Perlu peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi Program penanganannya.
7. Perlu penataan kewenangan penanganan trantibum dan penegakan Perda.

Dengan demikian maka, lingkungan strategis tersebut, sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatannya sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan dengan kondisi ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Tengah yang kondusif dengan mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

**d. Dampak Terhadap Visi dan Misi Pembangunan Provinsi**

Menyebabkan target yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu, tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini dapat diukur dengan capaian target SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

**e. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat mencapai hasil yang optimal sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung serta penunjang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sarana dan Prasarana Operasional di lapangan

Faktor sarana dan prasarana pendukung operasional di lapangan mempunyai peranan yang cukup penting serta signifikan dalam upaya pencapaian hasil yang lebih optimal, disamping itu dengan terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan operasional di lapangan akan memberikan semangat lebih serta etos kerja yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sarana dan Prasarana dimaksud diatas meliputi :



- a) Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2.
  - b) Perlengkapan Personil yang memadai dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur tetap (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja.
  - c) Pemberian Insentif yang memadai sesuai dengan unsur resiko yang dibebankan kepada personil Satpol PP.
2. Pembiayaan yang bersumber dari dana APBD perlu ditingkatkan sehingga bisa melaksanakan keseluruhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja melalui berbagai program dan kegiatan yang selama ini belum dilaksanakan agar lebih mendekati kebutuhan ideal dari perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  3. Peningkatan kapasitas serta kuantitas dari personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ideal untuk lingkup Provinsi sebagai rujukan untuk Satpol PP Kota Palangka Raya mempunyai jumlah personil Satpol PP sebanyak 197 orang, sedangkan kondisi saat ini untuk Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan memiliki anggota berjumlah 362 terdiri dari PNS 75 Orang dan Tenaga Kontrak 287 Orang personil Satpol PP.
  4. Lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

#### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Renja Tahun 2024 adalah:

- Jumlah Program : 2 program.
- Jumlah Kegiatan : 10 kegiatan.
- Jumlah Sub Kegiatan : 35 sub kegiatan.
- Pagu indikatif : Rp. 24.609.615.460,-.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Cakupan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi dengan target capaian tahun 2024 sebesar 100 %.

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan aspek indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani, target capaian 100 %.
2. Persentase Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani, target capaian 100 %.

Pagu Indikatif rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 OPD Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 13.579.460.193,- untuk kegiatan rutin (termasuk gaji Tenaga Kontrak), ditambah untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 11.030.155.267,- sehingga total Pagu Indikatif rancangan awal RKPD Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 24.609.615.460,-. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatorif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pertindungan Masyarakat				24.609.615.460	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pertindungan Masyarakat				26.070.629.533	
1.	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Presentase Keterlaksanaan	100	23.623.615.460	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Presentase Keterlaksanaan	100	23.720.628.533	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100	204.450.001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100	239.450.001	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	40.828.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	40.828.001	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.125.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.125.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	18.537.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	18.537.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	39.960.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	39.960.000	

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatorif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota P.Raja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Keterwakilan Umum dan Berkeadilan Masyarakat	1 dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota P.Raja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Keterwakilan Umum dan Berkeadilan Masyarakat	1 dokumen	85.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100	11.657.155.267	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100	11.180.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang	11.030.155.267	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang	11.150.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 dokumen	17.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 dokumen	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	52.840.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	150.000.000	
	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota P.Raja	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80 stel	52.840.000	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota P.Raja	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80 stel	150.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100	924.959.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100	1.180.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota P.Raja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota P.Raja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis	10.000.000	
	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Kota P.Raja	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 jenis	275.621.500	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Kota P.Raja	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 jenis	300.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	7 jenis	70.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kota P.Raja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	7 jenis	70.000.000	
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota P.Raja	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 dokumen	30.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raja	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 dokumen	30.000.000	
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	422.338.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	650.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dukungan Peleaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	670.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	670.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	670.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	670.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	10.208.849.532	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	10.421.179.532	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	415.179.532	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	415.179.532	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	9.783.670.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	10.000.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	505.361.160	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	550.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 unit	244.615.460	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 unit	250.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 gedung	210.745.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 gedung	250.000.000	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan pelayanan ketertaman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100	986.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan pelayanan ketertaman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100	2.350.000.000	
	Penanganan Gangguan Ketertaman dan Keteriban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase gangguan keamanan, ketertaman dan keteriban umum yang ditangani	100	572.000.000	Penanganan Gangguan Ketertaman dan Keteriban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase gangguan keamanan, ketertaman dan keteriban umum yang ditangani	100	1.400.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	670.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	670.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	670.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	670.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	10.208.849.532	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	10.421.179.532	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	415.179.532	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	415.179.532	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	9.783.670.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	10.000.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	505.361.160	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	550.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 unit	244.615.460	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 unit	250.000.000	
	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	50.000.000	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	5 jenis	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 gedung	210.745.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 gedung	250.000.000	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMATAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan pelayanan ketertaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100	986.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMATAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan pelayanan ketertaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100	2.350.000.000	
	Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase gangguan keamanan, ketertaman dan ketertiban umum yang ditangani	100	572.000.000	Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase gangguan keamanan, ketertaman dan ketertiban umum yang ditangani	100	1.400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 laporan	46.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 laporan	250.000.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina	100	176.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina	100	300.000.000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Menukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat serta Penegakan Perda	1 laporan	130.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Menukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat serta Penegakan Perda	1 laporan	150.000.000	
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Dilempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	20 dokumen	46.000.000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Dilempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	20 dokumen	150.000.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prinsipnya rancangan Rencana Kerja yang di buat tetap mengacu pada Program dan Kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan, kepentingan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- 2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat (Musrenbang, pikir dan usulan tokoh masyarakat).

**Table 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana strategik daerah Kabupaten/Kota secara jelas belum tentu mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi, hal ini mengingat adanya perbedaan tingkat prioritas pembangunan daerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki kaitan tugas dan fungsi yang baik, namun program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki kesamaan program dan kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Secara hirarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi yang memerlukan dukungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu penerapan pelayanan publik di daerah, penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dan Sasaran ini dibuat lebih riil dari misi dan diharapkan dapat menjadi pedoman melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yaitu :

**a. Tujuan**

Tujuan yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja Agar Lebih Efektif, Handal, Tangguh dan Profesional.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
5. Meningkatkan Kualitas Anggota Satlinmas Dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan Perlindungan Masyarakat.
6. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang Memadai Guna Menunjang Kelancaran Tugas.

**b. Sasaran**

Adapun sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan dimaksud adalah:

- 1) Meningkatnya pendapatan asli daerah melalui penegakan Perda dan Perkada.
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja.
- 3) Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4) Terlaksananya Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 5) Meningkatnya kualitas Anggota Satlinmas dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan Perlindungan Masyarakat.

- 6) Siapnya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran tugas.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ditunjang dengan Belanja Langsung, yaitu Belanja Operasi (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa), dan Belanja Modal (Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2024 bersumber dari dana APBD Provinsi. Program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi terdiri atas 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.991.144.885,-

<b>A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
	d. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
	f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan.
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
<b>B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
<b>7.</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>
	a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
	b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
	c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
	d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
	e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
	f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
<b>8.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>
	a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
	b. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
	c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
<b>9.</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>
	a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	b. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 akan disajikan pada Tabel 3.3 dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2025**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**  
 ( Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 )

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				25.992.144.887				26.394.000.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan		100	24.311.144.887	APBD		100	24.550.000.000
1.05.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu		100	145.000.000	APBD		100	290.000.000
1.05.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P. Raya	2 dokumen	10.000.000	APBD		2 dokumen	45.000.000
1.05.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P. Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000
1.05.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P. Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000
1.05.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota P. Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000
1.05.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	6 dokumen	85.000.000	APBD		6 dokumen	85.000.000
1.05.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
1.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu		100	11.933.347.336	APBD		100	11.185.000.000
1.05.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	72 orang	11.903.347.336	APBD		74 orang	11.150.000.000
1.05.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000
1.05.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota P.Raya	2 dokumen	20.000.000	APBD		2 dokumen	20.000.000
1.05.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	80.000.000	APBD		100	100.000.000
1.05.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota P.Raya	80 stel	80.000.000	APBD		80 stel	100.000.000



Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan		100	1.302.500.143	APBD		100	1.480.000.000
1.05.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	5 jenis	25.000.000	APBD		5 jenis	50.000.000
1.05.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	6 jenis	296.621.500	APBD		6 jenis	400.000.000
1.05.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota P.Raya	7 jenis	70.000.000	APBD		7 jenis	70.000.000
1.05.01.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	65.000.000
1.05.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	1 dokumen	740.878.643	APBD		1 dokumen	775.000.000
1.05.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	120.000.000	APBD		1 dokumen	120.000.000
1.05.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		100	10.045.297.408	APBD		100	10.380.000.000
1.05.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	15.000.000
1.05.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota P.Raya	3 laporan	251.627.408	APBD		3 laporan	365.000.000
1.05.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota P.Raya	3 laporan	9.783.670.000	APBD		3 laporan	10.000.000.000
1.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100	805.000.000	APBD		100	1.115.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota P.Raya	24 unit	400.000.000	APBD		24 unit	590.000.000
1.05.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota P.Raya	5 jenis	125.000.000	APBD		5 jenis	125.000.000
1.05.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota P.Raya	5 gedung	280.000.000	APBD		5 gedung	400.000.000
1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi</b>		100	1.681.000.000	APBD		100	1.844.000.000
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani		100	1.136.000.000	APBD		100	1.145.000.000
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Provinsi Kalteng	35 kasus	151.714.470	APBD		35 kasus	155.000.000
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Provinsi Kalteng	35 kasus	156.285.530	APBD		35 kasus	160.000.000
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalteng	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000



Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota P. Raya	1 dokumen	400.000.000	APBD		1 dokumen	400.000.000
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota P. Raya	100 orang	250.000.000	APBD		100 orang	250.000.000
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota P. Raya	1 laporan	76.000.000	APBD		1 laporan	80.000.000
<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani</b>		<b>100</b>	<b>322.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>474.000.000</b>
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	123.300.000	APBD		1 laporan	124.000.000
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	99.350.000	APBD		1 laporan	250.000.000
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Provinsi Kalteng	1 laporan	99.350.000	APBD		1 laporan	100.000.000
<b>1.05.02.1.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina</b>		<b>100</b>	<b>223.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>225.000.000</b>
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Provinsi Kalteng	1 laporan	155.000.000	APBD		1 laporan	155.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Provinsi Kalteng	20 dokumen	68.000.000	APBD		20 dokumen	70.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output,

outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

**KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA  
TAHUN 2021-2026**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>
Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Persentase (%)

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1  
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Kode (1)	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting (8)	Perkiraan Maju 2025	
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)		Target Capaian Kinerja (9)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			25.992.144.887			26.394.000.000		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan		100	24.311.144.887	APBD	24.550.000.000	100	
1.05.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu		100	145.000.000	APBD	290.000.000	100	
1.05.01.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	2 dokumen	10.000.000	APBD	45.000.000	2 dokumen	
1.05.01.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD	15.000.000	1 dokumen	
1.05.01.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD	15.000.000	1 dokumen	
1.05.01.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD	15.000.000	1 dokumen	
1.05.01.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD	15.000.000	1 dokumen	

Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.05.01.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	6 dokumen	85.000.000	APBD		6 dokumen	85.000.000
1.05.01.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
1.05.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu		100	11.933.347.336	APBD		100	11.185.000.000
1.05.01.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	72 orang	11.903.347.336	APBD		74 orang	11.150.000.000
1.05.01.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000
1.05.01.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota P.Raya	2 dokumen	20.000.000	APBD		2 dokumen	20.000.000
1.05.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	80.000.000	APBD		100	100.000.000
1.05.01.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota P.Raya	80 stel	80.000.000	APBD		80 stel	100.000.000



Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan		100	1.302.500.143	APBD		100	1.480.000.000
1.05.01.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota P. Raya	5 jenis	25.000.000	APBD		5 jenis	50.000.000
1.05.01.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota P. Raya	6 jenis	296.621.500	APBD		6 jenis	400.000.000
1.05.01.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota P. Raya	7 jenis	70.000.000	APBD		7 jenis	70.000.000
1.05.01.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P. Raya	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	65.000.000
1.05.01.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	1 dokumen	740.878.643	APBD		1 dokumen	775.000.000
1.05.01.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P. Raya	1 dokumen	120.000.000	APBD		1 dokumen	120.000.000
1.05.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		100	10.045.297.408	APBD		100	10.380.000.000
1.05.01.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P. Raya	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	15.000.000
1.05.01.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota P. Raya	3 laporan	251.627.408	APBD		3 laporan	365.000.000
1.05.01.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota P. Raya	3 laporan	9.783.670.000	APBD		3 laporan	10.000.000.000
1.05.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100	805.000.000	APBD		100	1.115.000.000



Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota P. Raya	24 unit	400.000.000	APBD		24 unit	590.000.000
1.05.01.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota P. Raya	5 jenis	125.000.000	APBD		5 jenis	125.000.000
1.05.01.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota P. Raya	5 gedung	280.000.000	APBD		5 gedung	400.000.000
1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi</b>		100	1.681.000.000	APBD		100	1.844.000.000
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani		100	1.136.000.000	APBD		100	1.145.000.000
1.05.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Provinsi Kalteng	35 kasus	151.714.470	APBD		35 kasus	155.000.000
1.05.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Provinsi Kalteng	35 kasus	158.285.530	APBD		35 kasus	160.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalteng	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
1.05.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota P. Raya	1 dokumen	400.000.000	APBD		1 dokumen	400.000.000
1.05.02.1.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernaung Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota P. Raya	100 orang	250.000.000	APBD		100 orang	250.000.000
1.05.02.1.01.09	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota P. Raya	1 laporan	76.000.000	APBD		1 laporan	80.000.000
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani		100	322.000.000	APBD		100	474.000.000
1.05.02.1.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	123.300.000	APBD		1 laporan	124.000.000
1.05.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	99.350.000	APBD		1 laporan	250.000.000
1.05.02.1.02.03	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Provinsi Kalteng	1 laporan	99.350.000	APBD		1 laporan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
										(4)	(5)
(1)	(2)	(3)									
1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina		100	223.000.000	APBD		100	225.000.000		
1.05.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Provinsi Kalteng	1 laporan	155.000.000	APBD		1 laporan	155.000.000		
1.05.02.1.03.02	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Provinsi Kalteng	20 dokumen	68.000.000	APBD		20 dokumen	70.000.000		

## BAB V

### PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2024. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini diharapkan ke depan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Palangka Raya, Desember 2023



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Tengah,

**BARU, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700228 199803 1 007